



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : Sumsel@sumselprov.go.id Website www.sumselprov.go.id

Palembang, 30 April 2026.

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang.

SURAT PENGANTAR

Nomor. SP/1736 /II/2026

No	Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Permohonan Usulan Pergeseran Anggaran Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat, sebagai bahan lebih lanjut. Terima kasih.

Tanda terima,


(.....)

 KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 

Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 30 April 2026

Nomor : 1731 /II/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Selaku Ketua Tim TAPD)
di
Palembang

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.1.5/01665/BPKAD-II/2026 tanggal 31 Maret 2026 Perihal Pembahasan Pergeseran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Bersama ini kami sampaikan alasan anggaran Perjalanan Dinas Biro Hukum dan HAM untuk tidak dilakukan efisiensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anggaran Perjalanan Dinas Biro Hukum dan HAM sangat terbatas, pagu anggaran yang tersedia hanya di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan pokok yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga apabila dilakukan efisiensi akan menghambat kelancaran program kerja;
2. Perjalanan dinas diperlukan untuk koordinasi, konsultasi, serta penyelesaian masalah hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kementerian/lembaga maupun instansi terkait dan masyarakat, tanpa dukungan anggaran perjalanan dinas pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan optimal;
3. Dengan tidak dilakukan efisiensi terhadap pos anggaran tersebut, diharapkan seluruh kegiatan Biro Hukum dan HAM dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut disampaikan rincian Pergeseran Anggaran Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Efisiensi (Rp.)	Pagu Setelah Efisiensi (Rp)	Efisiensi 30% (Rp)
1	2	3	4	
A	Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	1.227.130.000	1.020.700.000	
I.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	90.100.000	70.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.100.000	70.000.000	20.100.000
II.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.000.000	310.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan RAPAT Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.000.000	280.000.000	
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.000.000	560.700.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.000.000	560.700.000	104.300.000
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.030.000	80.000.000	
3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	162.030.000	80.000.000	82.030.000
B	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	793.299.136	762.277.636	
I	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	384.929.680	357.679.680	
1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	118.929.680	118.929.680	
2	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	80.310.175	80.310.175	
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	80.000.000	52.750.000	27.250.000
4	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	105.689.825	105.689.825	

II	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	408.369.456	404.597.956	
5	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	317.273.656	313.502.156	3.771.500
6	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	91.095.800	91.095.800	
	JUMLAH	2.020.429.136	1.782.977.636	237.451.500

Demikian permohonan pergeseran anggaran tahun 2026 ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar dapat dipertimbangkan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM.

Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, SH., SE., M.Si., C.MSP
PEMBINA TK. I (IV.b)
NIP 197809072007011005

- Tembusan :
- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
 - 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 - 3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.